



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN DI LAUT OLEH**

**KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**RESTY SISILIA OKTAVIANI**

**NPM 221003742019116**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN DI LAUT OLEH KAPAL  
ASING DI PERAIRAN INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
RESTY SISILIA OKTAVIANI  
NPM : 221003742019116

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. EVA ARIEF, SH, MH  
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

RUBIYANTO, SH, M.H  
NUPTK : 8447739640130073

Anggota,

PROF. DR. SIGIT IRIANTO, SH, MHUM  
NUPTK : 1445740641130072

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. ELY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	9
2. Tinjauan Tentang Pencurian Ikan Di Laut .....	15
3. Tinjauan Tentang Kapal Asing.....	21
B. Tinjauan Khusus.....	23
1. Tinjauan Khusus Tentang Perairan Indonesia .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tipe Penelitian.....	27
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Penyajian Data .....	35
F. Metode Analisa Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>37</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan Di Laut Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia .....	37

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing masih menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Aktivitas illegal fishing tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak pada kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan lokal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi masalah ini, praktik penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya perikanan serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan Indonesia, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan upaya penindakan terhadap pelaku illegal fishing belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum yang mengatur mengenai penanggulangan illegal fishing sebenarnya telah cukup memadai. Namun, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencurian Ikan; Kapal Asing; Perairan Indonesia.**

## **ABSTRACT**

*Illegal fishing conducted by foreign vessels remains a serious problem in the management of marine resources in Indonesia. This activity not only causes economic losses to the state but also threatens the sustainability of marine ecosystems and the welfare of local fishermen. Although the Indonesian government has established various regulations to address this issue, illegal fishing practices still frequently occur in several Indonesian waters. One of the regulations governing this matter is Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, which is an amendment to Law Number 31 of 2004. This regulation covers various aspects related to fisheries resource management and sanctions for violations committed in Indonesian waters. However, the implementation of law enforcement against criminal acts of fish theft by foreign vessels in the field still faces various obstacles. These challenges include limited surveillance facilities and infrastructure, the vast territorial waters of Indonesia, and less-than-optimal coordination among law enforcement agencies. These conditions make the enforcement efforts against illegal fishing activities not yet fully effective. This research aims to analyze national legal regulations related to criminal acts of fish theft by foreign vessels in Indonesian waters and to identify the obstacles encountered in their implementation. The research method used in this study is normative juridical research with a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials relevant to the issue being studied. The results of the study indicate that, normatively, the legal framework regulating the prevention and handling of illegal fishing is relatively adequate. However, the effectiveness of law enforcement still needs improvement, particularly in terms of coordination among related institutions, strengthening the capacity of law enforcement officers, and improving monitoring systems in Indonesian waters. With improvements in these aspects, it is expected that law enforcement against fish theft can be carried out more effectively and provide a deterrent effect for perpetrators.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Illegal Fishing; Foreign Vessels; Waters of Indonesia.*